# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Gambaran Umum

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer.

### 4.1.1 Sejarah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Bandung

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama tumenggung Wiraangunangun. Beliau memerintah Kabupaten Bandung hingga tahun 1681.

Di daerah Bandung khususnya dan daerah Priangan umumnya, Jalan Raya pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di daearh Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Asia Afrika - Jalan A. Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya, dan agar pejabat Pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor bupati, Daendels melalui

surat tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibuKota kabupaten, masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawadak (Tanjungsari), mendekati Jalan Raya Pos.

Rupanya Daendels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar, bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat Pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat Sungai Cikapundung, tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun (pusat Kota Bandung sekarang). Alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai ibukota Pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808/awal tahun 1809, bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekati lahan bakal ibukota baru. Mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke Kampur Bogor (Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan sekarang). Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, Kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan Kota itu langsung dipimpin oleh bupati. Dengan kata lain, Bupati R. A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (*the founding father*) Kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810.

Pembentukan dan susunan organisasai Dinas daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan peraturan daerah Kota Bandung nomor 13 tahun 2007. Dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang – undangan untuk menindak lanjuti pelaksanaan reformasi birokrasi serta upaya mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kota Bandung, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Dinas daerah Kota Bandung.

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 mengatur pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah, provinsi, dan Pemerintah daerah kabupaten/Kota Bandung (lembaran negara repoblik indonesia nomor 82 tahun 2007). Yang mengatur tentang pemekaran dan pembentukan wilayah kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung diatur oleh peraturan Pemerintah daerah Kota Bandung yang telah diubah denga peraturan daerah Kota Bandung nomor 06 tahun 2008. Dan dalam peraturan mengerti dalam negeri nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah.

Adapun Visi dan Misi dari Dinas satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintahan Kota Bandung adalah

1. Visi

"Terwujudnya Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Yang Bermartabat ( Bersih, Makmur, Taat Dan Bersahabat )"

2. Misi

a. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, Yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.
b. Mengembangkan perekonomian Kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian Kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
c. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadaran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.
d. Meningkatkan penataan Kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana Kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan Kota dengan tetap memperhatikan tata ruang Kota dan daya dukung lingkungan Kota .
e. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kota secara profesional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur Pemerintah dan masyarakat.
f. Mengembangkan sistem keuangan Kota, mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, swasta dan masyarakat.

### 4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung

Struktur organisasi merupakan suatu bagian dan uraian tugas yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggungjawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Struktur organisasi Pemerintahan Kota Bandung Dinas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada Kota Bandung terdiri dari :

a. Staf Ahli
b. 17 Dinas Pemerintahan Kota.
c. Kecamatan Dan Kelurahan.
d. Sekretariat Daerah.
e. DPRD
f. Perusahaan Daerah.
g. Lembaga Teknis Daerah.

Beberapa ketentuan dalam peraturan daerah Kota Bandung nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas daerah Kota Bandung, dengan peraturan daerah ini dibentuk Dinas daerah Kota Bandung sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari :

a. Dinas pendidikan.
b. Dinas kesehatan.
c. Dinas sosial.
d. Dinas tenaga kerja.
e. Dinas perhubungan.

f. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

g. Dinas kebudayaan dan pariwisata.

h. Dinas tata ruang dan cipta karya.

i. Dinas bina marga dan pengairan.

j. Dinas pemakaman dan pertamanan.

k. Dinas kebakaran,

l. Dinas koperasi, UKM perindustrian dan perdagangan.

m. Dinas pertanian dan ketahanan pangan.

n. Dinas pendapatan.

o. Dinas komunikasi dan informatika.

p. Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah

q. Dinas pemuda dan olah raga.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 sekretariat daerah terdiri dari beberapa bagian dalam Pemerintahan Kota Bandung yaitu :

a. Asisten Pemerintah daerah.

b. Asisten ekbang dan kestra.

c. Asisten admistrasi umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdiri dari :

a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meliputi :

- Bagian hukum dan persidangan.
- Bagian umum, dan
- Bagian keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 perusahaan daerah terdiri dari beberapa perusahaan yaitu :

a. PD. BPR
b. PDAM
c. PD.Kebersihan
d. PD. Pasar Bermatabat
e. Rumah sakit umum daerah Kota Bandung
f. Rumah sakit khusus ibu dan anak
g. Rumah sakit khusus gigi dan mulut

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 lembaga teknis daerah Pemerintahan Kota Bandung terdiri dari beberapa bagian unit kerja yaitu :

a. Badan perencanaan pembangunan daerah.
b. Badan kepegawaian daerah.
c. Badan kesatuan bangsa perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.
d. Badan pengelolaan lingkungan hidup.
e. Badan pemberdayaan perempuan dan KB.
f. Badan pelayanan perizinan terpadu.
g. Kantor perpustakaan dan arsip daerah.

Dari 71 SKPD yang ada di Kota Bandung, peneliti mengambil dan melakukan survey di 17 Dinas yang berada di Kota Bandung, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Dinas pendidikan.
b. Dinas kesehatan.

c. Dinas sosial.
d. Dinas tenaga kerja.
e. Dinas perhubungan.
f. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
g. Dinas kebudayaan dan pariwisata.
h. Dinas tata ruang dan cipta karya.
i. Dinas bina marga dan pengairan.
j. Dinas pemakaman dan pertamanan.
k. Dinas kebakaran,
l. Dinas koperasi, UKM perindustrian dan perdagangan.
m. Dinas pertanian dan ketahanan pangan.
n. Dinas pendapatan.
o. Dinas komunikasi dan informatika.
p. Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah
q. Dinas pemuda dan olah raga.

### 4.1.3 Job Description Dinas SKPD Pemerintahan Kota Bandung

Tugas, wewenang dan tanggung jawab merupakan fungsi dari setiap bagian di dalam Dinas SKPD Pemerintahan Kota Bandung yang dapat membedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Berikut adalah tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap bagian :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merusmuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan

Pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembentukan pada masing – masing Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program Dinas berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
b. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar.
c. Membina bawahan dilingkungan Dinas dengan cara memberikan *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan produktifitas kerja.
d. Memantau mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset daya aperatur pengelolaan keuangan daerah.
e. Menyelenggarakan monitoring pembinaan pelaksanaaan penetapan kebijakan pengelolaan dan pengawasan investasi dan aset daerah.

2. Sekretariat mempunyai tugas pokok malaksanakan sebagian tugas kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan, serta pengkoordinasian tugas – tugas bidang masing-masing Dinas.

3. Sub Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah provinsi dan Pemerintah pusat.
4. Sub Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok sekretaris bagian lingkup keuangan dan program melakukan aktifitas pengkoordinasian dan penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja instansi Pemerintahan (LAKIP), laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ), laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD), dan informasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (IPPD).
5. Bidang anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas yan menjadi kewenangan di bidang keuangan dan aset lingkup anggaran, serta menyusun rencana program di bidang anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
6. Bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas yang menjadi kewenangan di bidang keuangan aset lingkup perbendaharaan, serta mengkaji bahan kebijakan teknis dibidang belanja langsung dan tidak langsung serta pembiayaan dan manajemen kas sebagai bahan rumusan kebijakan.
7. Bidang pemberdayaan aset mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada di masing – masing SKPD.

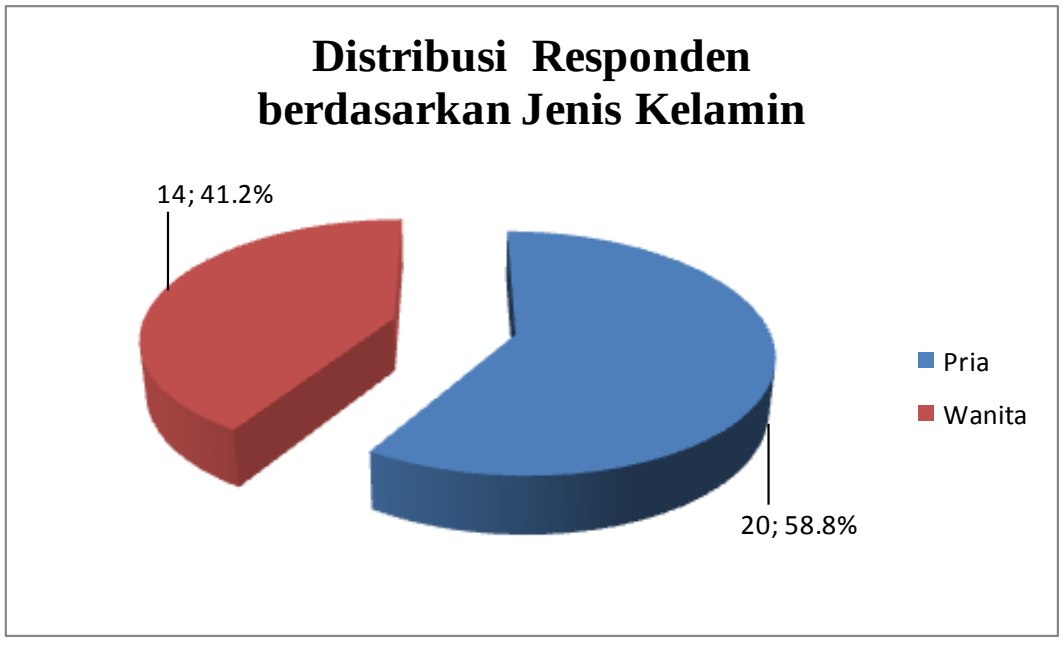
8. Bidang akuntansi mempunyai tugas pokok mengkaji dan mengkoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup akuntansi pendapatan dan pembiayaan, akuntansi belanja serta pencatatan dan pelaporan sebagai bahan rumusan kebijakan.

## 4.2 Karakteristik Responden

### 4.2.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.1**
**Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin**

| No | Jenis Kelamin | f | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Pria | 20 | 58.8% |
| 2. | Wanita | 14 | 41.2% |
| | Total | 34 | 100.0% |




**Gambar 4.1 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin**

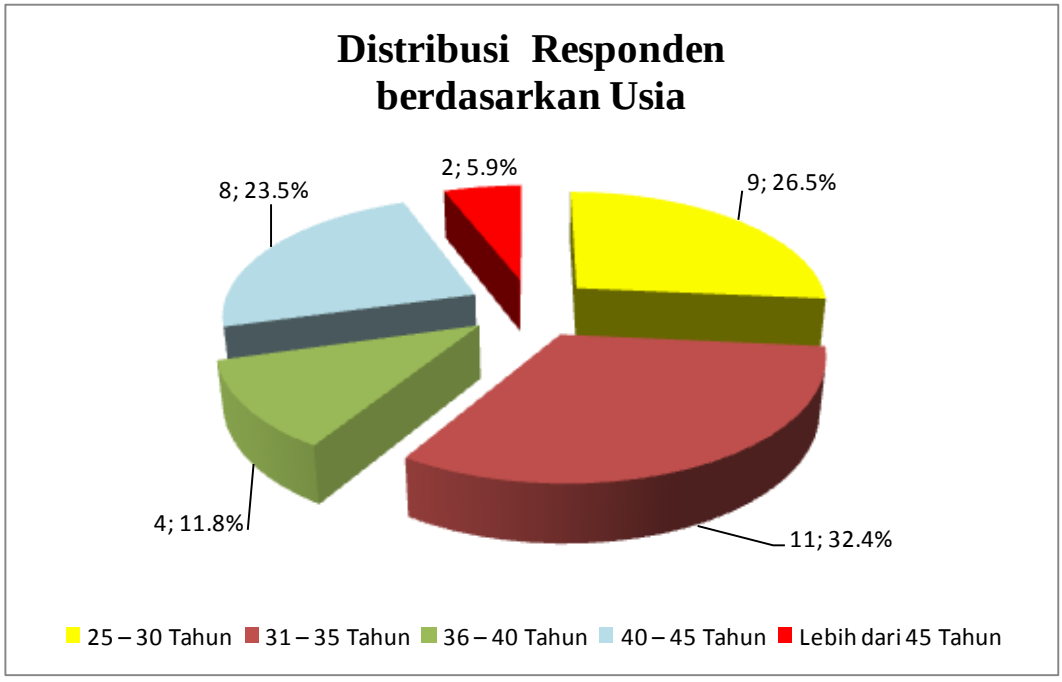
Berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat bahwa sebagian besar responden adalah Pria, yaitu ada sebanyak 20 orang atau sebesar 58.8% dari responden. Sedangkan responden Wanita ada 14 orang atau sebesar 41.2%.

### 4.2.2 Profil Responden Berdasarkan Usia

**Tabel 4.2**

**Distribusi Responden berdasarkan Usia**

| No | Usia | f | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 – 30 Tahun | 9 | 26.5% |
| 2 | 31 – 35 Tahun | 11 | 32.4% |
| 3 | 36 – 40 Tahun | 4 | 11.8% |
| 4 | 40 – 45 Tahun | 8 | 23.5% |
| 5 | Lebih dari 45 Tahun | 2 | 5.9% |
| | Total | 34 | 100.0% |




**Gambar 4.2**

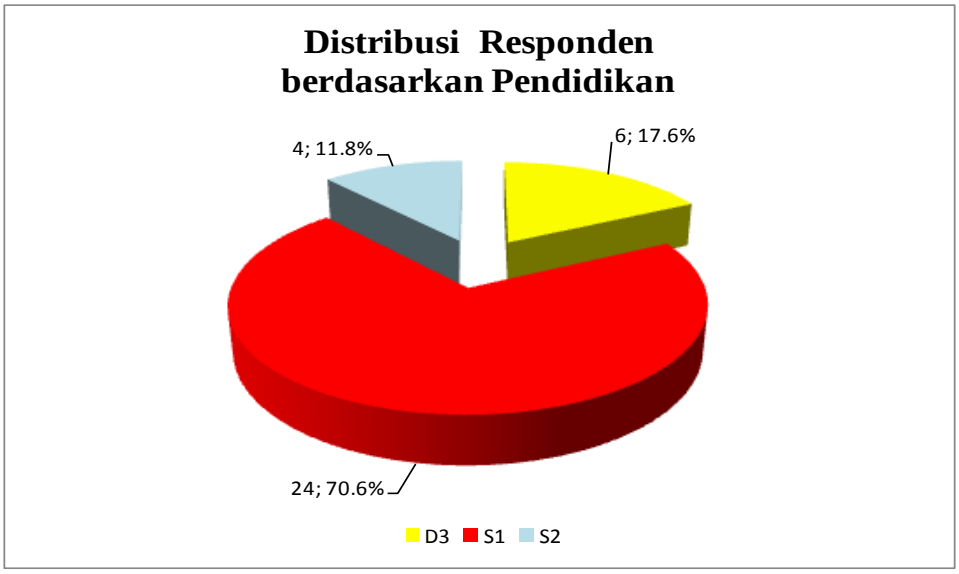
**Distribusi Responden Menurut usia**

Pada gambar di atas terlihat bahwa sebagian responden berusia antara 31 – 35 tahun, yaitu sebanyak 11 responden atau sebesar 32.4%. Disusul kemudian responden berusia antara 25 – 30 tahun yaitu sebanyak 9 responden atau sebesar 26.5% dari seluruh jumlah responden, responden berusia antara 40 – 45 tahun yaitu sebanyak 8 responden atau sebesar 23.5% dari seluruh jumlah responden, responden berusia antara 36 – 40 tahun yaitu sebanyak 4 responden atau sebesar 11.8% dari seluruh jumlah responden dan responden berusia lebih dari 45 tahun yaitu sebanyak 2 responden atau sebesar 5.9% dari seluruh jumlah responden.

### 4.2.3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

**Tabel 4.3**
**Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir**

| No | Pendidikan Terakhir | f | % |
|---|---|---|---|
| 1 | D3 | 6 | 17.6% |
| 2 | S1 | 24 | 70.6% |
| 3 | S2 | 4 | 11.8% |
| | Total | 34 | 100.0% |



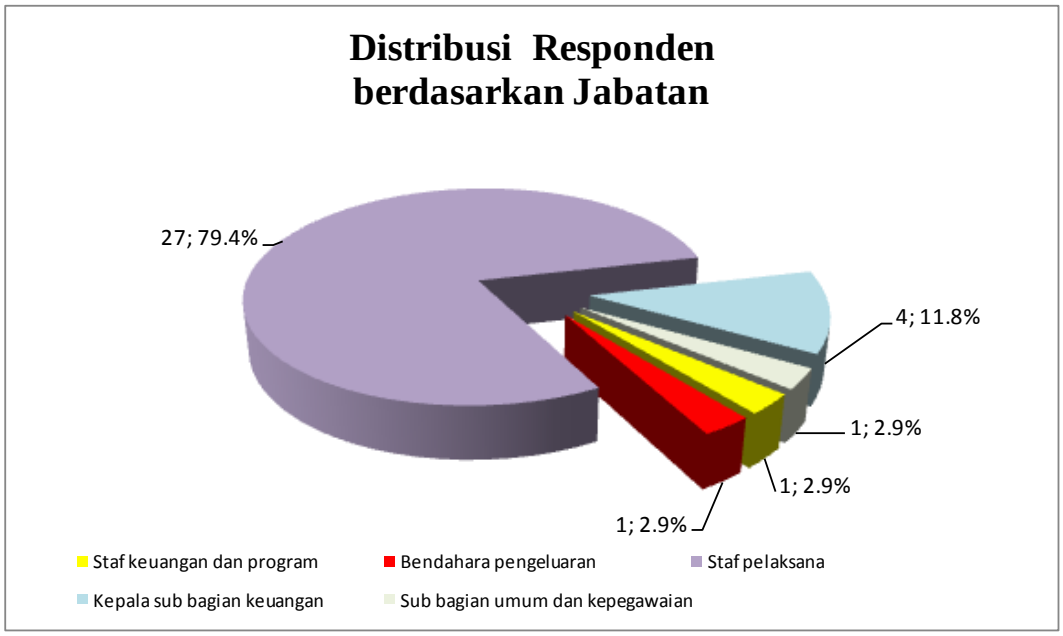

**Gambar 4.3 Distribusi Responden Menurut Pendidikan**

Berdasarkan pendidikan terlihat bahwa jumlah terbesar adalah responden dengan tingkat pendidikan S1, yaitu sebanyak 24 responden atau sebesar 70.6% dari seluruh jumlah responden yang ada. Disusul kemudian responden dengan pendidikan sarjana D3 yaitu sebanyak 6 responden atau sebesar 17.6%. Sementara responden yang berpendidikan S2 ada sebanyak 4 orang atau sebesar 11.8% dari total responden.

### 4.2.4 Profil Responden Berdasarkan Jabatan

**Tabel 4.4**
**Distribusi Responden berdasarkan Jabatan**

| No | Jabatan | f | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Staf pelaksana | 27 | 79.4% |
| 2 | Staf keuangan dan program | 1 | 2.9% |
| 3 | Kepala sub bagian keuangan | 4 | 11.8% |
| 4 | Bendahara pengeluaran | 1 | 2.9% |
| 5 | Sub bagian umum dan kepegawaian | 1 | 2.9% |
| | Total | 34 | 100.0% |




**Gambar 4.4 Distribusi Responden Menurut Jabatan**

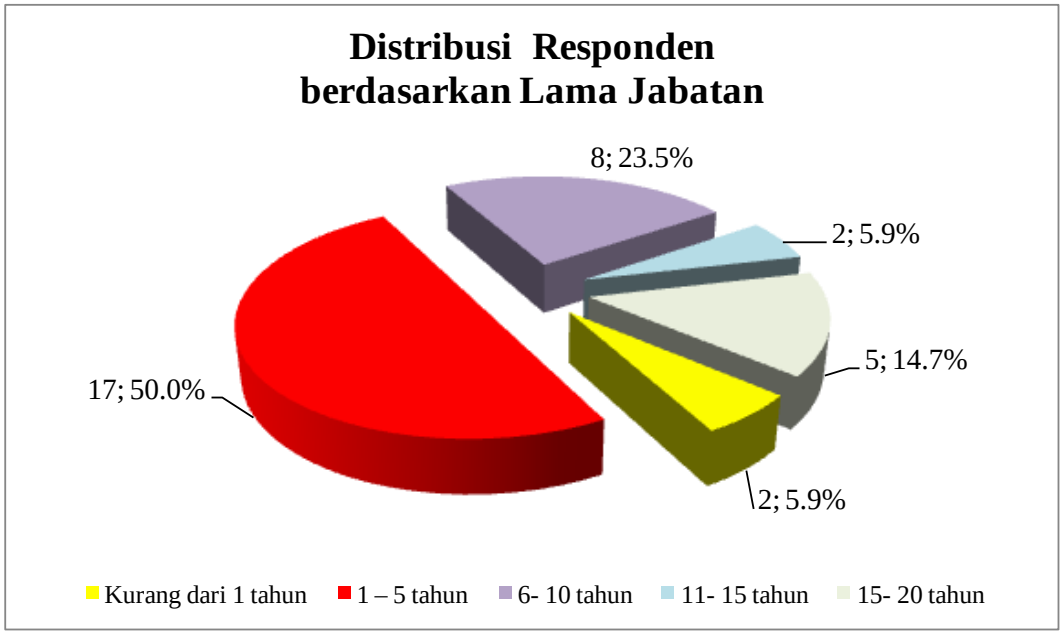
Pada gambar di atas terlihat bahwa sebagian besar adalah Staf pelaksana, yaitu sebanyak 27 responden atau sebesar 79.4%. Sementara responden yang lainnya ada 4 orang Kepala sub bagian keuangan (11,8%), masing-masing 1 orang (2,9%) Staf keuangan dan program, Bendahara pengeluaran dan Sub bagian umum dan kepegawaian.

### 4.2.5 Profil Responden Berdasarkan Lama Jabatan

**Tabel 4.5**

**Distribusi Responden berdasarkan lama jabatan**

| No | Lama jabatan | f | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurang dari 1 tahun | 2 | 5.9% |
| 2 | 1 – 5 tahun | 17 | 50.0% |
| 3 | 6- 10 tahun | 8 | 23.5% |
| 4 | 11 – 15 | 2 | 5.9% |
| 5 | 15- 20 tahun | 5 | 14.7% |
| | Total | 34 | 100.0% |




**Gambar 4.5 Distribusi Responden Menurut lama jabatan**

Pada gambar di atas terlihat bahwa sebagian responden sudah menjabat antara 1 - 5 tahun, yaitu sebanyak 17 responden atau sebesar 50,0 %. Disusul kemudian responden yang lama menjabat antara 6-10 tahun yaitu sebanyak 8 responden atau sebesar 23.5% dari seluruh jumlah responden dan responden yang lama menjabat antara 15-20 tahun yaitu sebanyak 5 responden atau sebesar 14,7%. Sementara responden yang baru menjabat kurang dari 1 tahun ada 2 orang atau 5,9% dan responden yang menjabat kurang antara 11-15 tahun ada 2 orang atau 5,9%.

Uraian mengenai data hasil penelitian digunakan untuk memberikan gambaran kondisi objek penelitian yang diamati berdasarkan tanggapan responden terhadap setiap indikator dan variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden melalui persentase jumlah skor tanggapan responden.

## 4.3 Analisis Deskriptif Variabel

### 4.3.1 Analisis Deskriptif Pengawasan intern

Pengawasan intern merupakan suatu proses, melibatkan *board of directors*, manajemen, komite audit, internal audit, dan seluruh anggota organisasi, dan memiliki tiga tujuan utama, yaitu: efektifitas dan efesiensi operasi, mendorong kehandalan laporan keuangan, dan dipatuhinya hukum dan peraturan yang ada. Variabel Pengawasan intern diukur dengan 5 Indikator yaitu Lingkungan pengendalian, Penaksiran risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan

komunikasi dan Monitoring (pemantauan) dan dioperasionalisasikan menjadi 14 butir pernyataan.

Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang pengawasan intern pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.5**
**Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Pengawasan Intern**

| No | Indikator | Skor Aktual | Skor Ideal | Persen (%) | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lingkungan pengendalian | 544 | 850 | 64.0% | Cukup Baik |
| 2 | Penaksiran risiko | 389 | 510 | 76.3% | Baik |
| 3 | Kegiatan pengendalian | 348 | 510 | 68.2% | Baik |
| 4 | Informasi dan komunikasi | 136 | 170 | 80.0% | Baik |
| 5 | Monitoring (pemantauan) | 277 | 340 | 81.5% | Baik |
| | Total | 1694 | 2380 | 71.2% | Baik |

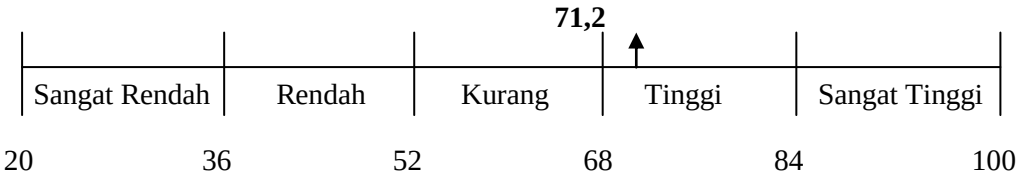
**Keterangan : a. Sangat baik (84,8%-100%), b. Baik (68,2%-84,7%)**
**c. Cukup baik (52,4%-68,10%) d. Kurang baik (36,2%-52,3%)**
**e. Tidak baik (0,00%-36,10%)**

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan intern di sudah dinilai baik. Hal ini berarti bahwa Pengawasan intern sudah berjalan meskipun belum optimal terutama dalam lingkungan pengendalian.

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.5 di atas tersebut di interpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 4.6**

**Skala Penafsiran Persentase Skor Variabel Pengawasan Intern**




Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel pengawasan intern sebesar 71,2 berada di antara interval 68 – 84. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan intern pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung secara umum berada dalam kategori tinggi. Bila dilihat berdasarkan indikator tampak bahwa penaksiran risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring dalam pengawasan intern sudah tinggi, namun lingkungan pengendalian dalam pengawasan intern masih kurang.

Dan hal ini sama dengan fenomena yang disebutkan pada latar belakang bahwa dalam pengawasan intern yaitu dimana pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi yang tidak memadai, serta sistem informasi akuntasi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai sehingga membuat sistem pengendalian intern kurang memadai(www.bpk.go.id).

Agar lebih jelas maka penulis juga menyajikan gambaran pengawasan intern pada masing-masing butir pernyataan, yang diukur menggunakan 5 (lima) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 14 butir pernyataan. Berikut gambaran tanggapan responden terhadap setiap butir pertanyaan pada masing-masing indikator.

**1.** Lingkungan pengendalian

Gambaran mengenai indikator lingkungan pengendalian di Dinas-Dinas Kota Bandung terangkum pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**
**Distribusi Jawaban Responden mengenai Indikator**
**Lingkungan pengendalian**

| No. | Butir Pernyataan | | Skor Tanggapan Responden | | | | | Total Skor | Skor Ideal | % Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 1 | Kurangnya penegakan integritas dan nilai etika di SKPD pada lingkungan pengendalian | F | 4 | 5 | 11 | 9 | 5 | 96 | 170 | 56.5% |
| | | % | 11.76 | 14.71 | 32.35 | 26.47 | 14.71 | | | |
| 2 | Terjadi pendelegasian wewenang di SKPD pada lingkungan pengendalian | F | 6 | 15 | 8 | 1 | 4 | 120 | 170 | 70.6% |
| | | % | 17.65 | 44.12 | 23.53 | 2.94 | 11.76 | | | |
| 3 | Tanggungjawab yang kurang tepat di SKPD pada pengendalian intern | F | 4 | 8 | 9 | 9 | 4 | 101 | 170 | 59.4% |
| | | % | 11.76 | 23.53 | 26.47 | 26.47 | 11.76 | | | |
| 4 | kepemimpinan yang kurang kondusif di SKPD pada lingkungan pengendalian | F | 1 | 22 | 3 | 7 | 1 | 117 | 170 | 68.8% |
| | | % | 2.94 | 64.71 | 8.82 | 20.59 | 2.94 | | | |
| 5 | peran aparat pengawasan intern yang kurang efektif di SKPD pada pengendalian intern | F | 3 | 13 | 9 | 7 | 2 | 110 | 170 | 64.7% |
| | | % | 8.82 | 38.24 | 26.47 | 20.59 | 5.88 | | | |
| Total Skor<br>% Skor Aktual | | | | | | | | 544<br>64.0% | 850 | |

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Lingkungan pengendalian mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{544}{34 \times 5 \times 5} \times 100\%$$

% skor aktual = 64,0%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Lingkungan pengendalian berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 64,0%. Nilai yang diperoleh masuk kategori cukup baik (berada pada interval 68%- 84%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa dalam pengawasan intern pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung dilihat dari lingkungan pengendalian meskipun belum optimal tapi dinilai sudah cukup baik dalam pelaksanaannya sehingga dapat mendorong efektifitas dan efesiensi operasi, mendorong kehandalan laporan keuangan, dan dipatuhinya hukum dan peraturan yang ada. Terlihat dari tanggapan responden masih rendahnya penegakan integritas dan nilai etika di Dinas Pemerintah Daerah Kota Bandung pada lingkungan pengendalian dan tanggungjawab yang masih banyak dinilai kurang tepat di Dinas Pemerintah Daerah Kota Bandung pada pengendalian intern.

**2. Penaksiran Risiko**

Gambaran mengenai indikator Penaksiran risiko di Dinas-Dinas Kota Bandung terangkum pada tabel berikut:

**Tabel 4.7**
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Penaksiran risiko**

| No. | Butir Pernyataan | | Skor Tanggapan Responden | | | | | Total Skor | Skor Ideal | % Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 6 | Pimpinan instansi Pemerintah daerah menetapkan strategi operasional yang konsisten. | F | 14 | 8 | 11 | 0 | 1 | 136 | 170 | 80.0% |
| | | % | 41.18 | 23.53 | 32.35 | 0.00 | 2.94 | | | |
| 7 | Pimpinan instansi Pemerintah daerah menetapkan strategi manajemen yang terintegritasi dengan rencana penilaian risiko | F | 13 | 9 | 7 | 5 | 0 | 132 | 170 | 77.6% |
| | | % | 38.24 | 26.47 | 20.59 | 14.71 | 0.00 | | | |
| 8 | Pemerintah daerah belum optimal dalam melakukan analisis risiko | F | 8 | 10 | 11 | 3 | 2 | 121 | 170 | 71.2% |
| | | % | 23.53 | 29.41 | 32.35 | 8.82 | 5.88 | | | |
| Total Skor | | | | | | | | 389 | 510 | |
| % Skor Aktual | | | | | | | | 76.3% | | |

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Penaksiran risiko mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{389}{34 \times 5 \times 3} \times 100\%$$

% skor aktual = 76,3%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Penaksiran risiko berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 76,3%. Nilai yang diperoleh masuk kategori baik (berada pada interval 68%- 84%). Hasil yang diperoleh mengandung

pengertian bahwa dalam pengawasan intern pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung dilihat dari penaksiran resiko meskipun belum optimal tapi dinilai sudah baik dalam pelaksanaannya sehingga dapat mendorong efektifitas dan efesiensi operasi, mendorong kehandalan laporan keuangan, dan dipatuhinya hukum dan peraturan yang ada.

### 3. Kegiatan Pengendalian

Gambaran mengenai indikator kegiatan pengendalian di Dinas-Dinas Kota Bandung terangkum pada tabel berikut:

**Tabel 4.8**
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Kegiatan pengendalian**

| No. | Butir Pernyataan | | Skor Tanggapan Responden | | | | | Total Skor | Skor Ideal | % Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 9 | Pengendalian fisik dan asset belum memadai di SKPD pada kegiatan pengendalian | F | 8 | 13 | 7 | 4 | 2 | 123 | 170 | 72.4% |
| | | % | 23.53 | 38.24 | 20.59 | 11.76 | 5.88 | | | |
| 10 | Pencatatan transaksi belum memadai di SKPD pada kegiatan pengendalian | F | 11 | 15 | 3 | 4 | 1 | 133 | 170 | 78.2% |
| | | % | 32.35 | 44.12 | 8.82 | 11.76 | 2.94 | | | |
| 11 | Pencatatan transaksi tidak tepat waktu di SKPD pada kegiatan pengendalian | F | 2 | 9 | 5 | 13 | 5 | 92 | 170 | 54.1% |
| | | % | 5.88 | 26.47 | 14.71 | 38.24 | 14.71 | | | |
| Total Skor | | | | | | | | 348 | 510 | |
| % Skor Aktual | | | | | | | | 68.2% | | |

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Kegiatan pengendalian mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{537}{34 \times 5 \times 3} \times 100\% \qquad \% \text{ skor aktual} = 68{,}2\%$$

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Kegiatan pengendalian pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung, berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 68,2%. Nilai yang diperoleh masuk kategori baik (berada pada interval 68%- 84%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa dalam pengawasan intern pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung dilihat dari Kegiatan pengendalian meskipun belum optimal tapi dinilai sudah baik dalam pelaksanaannya sehingga dapat mendorong efektifitas dan efesiensi operasi, mendorong kehandalan laporan keuangan, dan dipatuhinya hukum dan peraturan yang ada.

**4. Informasi Dan Komunikasi**

Gambaran mengenai indikator informasi dan komunikasi di Dinas-Dinas Kota Bandung terangkum pada tabel berikut:

**Tabel 4.9**
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Informasi dan komunikasi**

| No. | Butir Pernyataan | | Skor Tanggapan Responden | | | | | Total Skor | Skor Ideal | % Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 12 | Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, instansi Pemerintah menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi | F | 14 | 10 | 7 | 2 | 1 | 136 | 170 | 80.0% |
| | | % | 41.18 | 29.41 | 20.59 | 5.88 | 2.94 | | | |

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Informasi dan komunikasi mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{136}{34 \times 5 \times 1} \times 100\%$$

% skor aktual = 80,0%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Informasi dan komunikasi berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 80,0%. Nilai yang diperoleh masuk kategori baik (berada pada interval 68%- 84%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa dalam pengawasan intern pada Dinas-Dinas Kota Bandung dilihat dari Kegiatan Informasi dan komunikasi yang dapat mendorong efektifitas dan efesiensi operasi, mendorong kehandalan laporan keuangan, dan dipatuhinya hukum dan peraturan yang ada meskipun belum optimal tapi dinilai sudah baik dalam pelaksanaannya.

**5. *Monitoring* (pemantauan)**

**Tabel 4.10**
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Monitoring (pemantauan)**

| No. | Butir Pernyataan | | Skor Tanggapan Responden | | | | | Total Skor | Skor Ideal | % Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 13 | Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, instansi Pemerintah mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus-menerus | f | 13 | 13 | 4 | 4 | 0 | 137 | 170 | 80.6% |
| | | % | 38.24 | 38.24 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | | | |
| 14 | Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit an reviu lainnya yang ditetapkan | f | 15 | 10 | 7 | 2 | 0 | 140 | 170 | 82.4% |
| | | % | 44.12 | 29.41 | 20.59 | 5.88 | 0.00 | | | |
| Total Skor<br>% Skor Aktual | | | | | | | | 277<br>81.5% | 340 | |

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Monitoring (pemantauan) mengunakan rumus sebagai berikut:

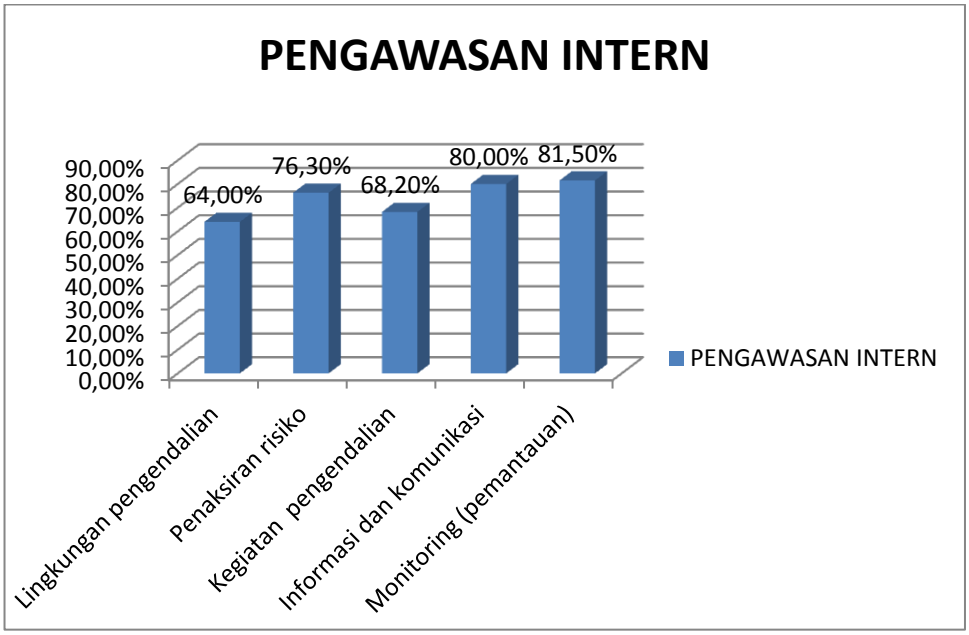
$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{277}{34 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

% skor aktual = 81,5%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Monitoring (pemantauan) berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 81,5%. Nilai yang diperoleh masuk kategori baik (berada pada interval 68%- 84%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa dalam pengawasan intern pada Dinas-Dinas Kota Bandung dilihat dari Monitoring (pemantauan) telah dilaksanakan secara baik meskipun belum optimal.

Untuk lebih jelasnya tanggapan responden terhadap dimensi lingkungan pengendalian, penafsiran risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring pada Dinas Pemerintah Daerah Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 4.6.




Gambar 4.6. Histrogram Tanggapan Responden terhadap pengawasan intern

### 4.3.2 Analisis Deskriptif Pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner.Dalam penelitian yang dilakukan variabel Pengawasan intern diukur dengan 4 Indikator yaitu akuntabilitas, kejujuran, transparansi dan pengendalian. Dan kemudian dioperasionalisasikan menjadi 7 butir pernyataan.

Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang pengelolaan keuangan daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap butir

pernyataan. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.11**

**Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah**

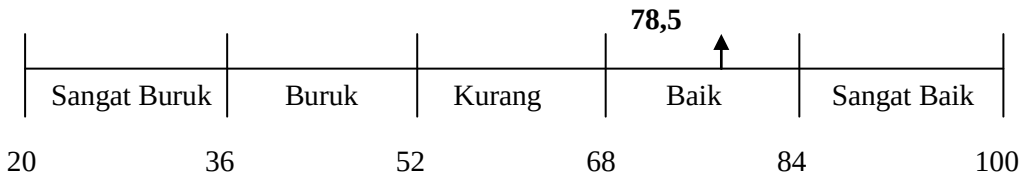
| No | Indikator | Skor Aktual | Skor Ideal | % Skor Aktual | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akuntabilitas | 218 | 340 | 64.1% | Cukup Baik |
| 2 | Kejujuran | 305 | 340 | 89.7% | Baik |
| 3 | Transparansi | 275 | 340 | 80.9% | Baik |
| 4 | Pengendalian | 136 | 170 | 80.0% | Baik |
| | Total | 934 | 1190 | 78.5% | Baik |

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung sudah dinilai baik yang berarti bahwa Pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan meskipun belum optimal terutama pada akuntabilitas masih terlihat rendah dibandingkan indikator-indikator lainnya.

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.9 di atas tersebut di interpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 4.7**

**Skala Penafsiran Persentase Skor Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah**




Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel pengelolaan keuangan daerah sebesar 78,5 berada di antara interval

68 – 84. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung secara umum berada dalam kategori baik.

Bila dilihat berdasarkan indikator juga tampak bahwa kejujuran, transparansi, dan pengendalian pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung sudah baik, namun pada indikator akuntabilitas berada dalam kategori cukup baik.

Dan hal ini sama dengan fenomena yang disebutkan pada latar belakang bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu terdapat temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sehingga mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan dan administrasi. (www.bpk.go.id). Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung tidak akuntabel.

Agar lebih jelas maka penulis juga menyajikan gambaran pengelolaan keuangan pada masing-masing butir pernyataan, yang diukur menggunakan 4 (empat) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 7 butir pernyataan. Berikut gambaran tanggapan responden terhadap setiap butir pertanyaan pada masing-masing indikator.

## 1. Akuntabilitas

Gambaran mengenai indikator akuntabilitas di Dinas-Dinas Kota Bandung terangkum pada tabel berikut:

**Tabel 4.11**

**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Akuntabilitas**

| No. | Butir Pernyataan | | Skor Tanggapan Responden | | | | | Total Skor | Skor Ideal | % Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 15 | Kepala daerah melaporkan segala yang terjadi berkaitan dengan penggunaan dana | f | 2 | 6 | 18 | 8 | 0 | 104 | 170 | 61.2% |
| | | % | 5.88 | 17.65 | 52.94 | 23.53 | 0.00 | | | |
| 16 | Akuntabilitas kepada masyarakat masih belum ada mekanisme yang cukup dalam pertanggungjawabannya | f | 0 | 18 | 11 | 4 | 1 | 114 | 170 | 67.1% |
| | | % | 0.00 | 52.94 | 32.35 | 11.76 | 2.94 | | | |
| Total Skor | | | | | | | | 218 | 340 | |
| % Skor Aktual | | | | | | | | 64.1% | | |

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator akuntabilitas mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{218}{34 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

% skor aktual = 64,1%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator akuntabilitas berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 64,1%. Nilai yang diperoleh masuk kategori cukup baik (berada pada interval 52%- 68%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa akuntabilitas dari Pengelolaan keuangan daerah pada Dinas di

Pemerintah Daerah Kota Bandung dinilai masih belum optimal sehingga perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik.

**1. Kejujuran**

**Tabel 4.12**

**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator kejujuran**

| No. | Butir Pernyataan | | Skor Tanggapan Responden | | | | | Total Skor | Skor Ideal | % Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 17 | Penempatan staf yang jujur dengan didukung oleh sistem pengelolaan yang baik akan memdorong terjadinya penghematan sebagai dampak kecilnya korupsi | f | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 152 | 170 | 89.4% |
| | | % | 64.71 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 18 | Dalam melakukan operasional keuangan daerah harus diserahkan kepada staf yang jujur serta memiliki integritas yang tinggi | f | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 153 | 170 | 90.0% |
| | | % | 64.71 | 20.59 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Total Skor | | | | | | | | 305 | 340 | |
| % Skor Aktual | | | | | | | | 89.7% | | |

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator kejujuran mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{537}{34 \times 5 \times 3} \times 100\%$$

% skor aktual = 89,7%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator kejujuran berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 89,7%. Nilai yang diperoleh masuk kategori baik (berada pada interval 68%- 84%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa dari sisi kejujuran dinilai Pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pemerintah daerah Kota Bandung yang dilakukan telah jujur dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah

**2. Transparansi**

**Tabel 4.13**

**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator transparansi**

| No. | Butir Pernyataan | | Skor Tanggapan Responden | | | | | Total Skor | Skor Ideal | % Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 19 | Pemerintah terbuka dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah | f | 13 | 13 | 7 | 1 | 0 | 140 | 170 | 82.4% |
| | | % | 38.24 | 38.24 | 20.59 | 2.94 | 0.00 | | | |
| 20 | Transparansi dimilki Pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi yang lebih mudah | f | 13 | 10 | 9 | 1 | 1 | | | |
| | | % | 38.24 | 29.41 | 26.47 | 2.94 | 2.94 | 135 | 170 | 79.4% |
| Total Skor | | | | | | | | 275 | 340 | |
| % Skor Aktual | | | | | | | | 80.9% | | |

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator transparansi mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{275}{34 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

% skor aktual = 80.9%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator transparansi berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 80.9%. Nilai yang diperoleh masuk kategori baik (berada pada interval 68%- 84%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa trnsparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung dinilai sudah baik meskipun belum optimal.

**3. Pengendalian**

**Tabel 4.14**

**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Pengendalian**

| No. | Butir Pernyataan | | Skor Tanggapan Responden | | | | | Total Skor | Skor Ideal | % Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 21 | Terbuka dalam melakukan control terhadap proses perencanaan pengeluaran dengan implementasi | f | 13 | 11 | 7 | 3 | 0 | 136 | 170 | 80.0% |
| | | % | 38.24 | 32.35 | 20.59 | 8.82 | 0.00 | | | |

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator pengendalian mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

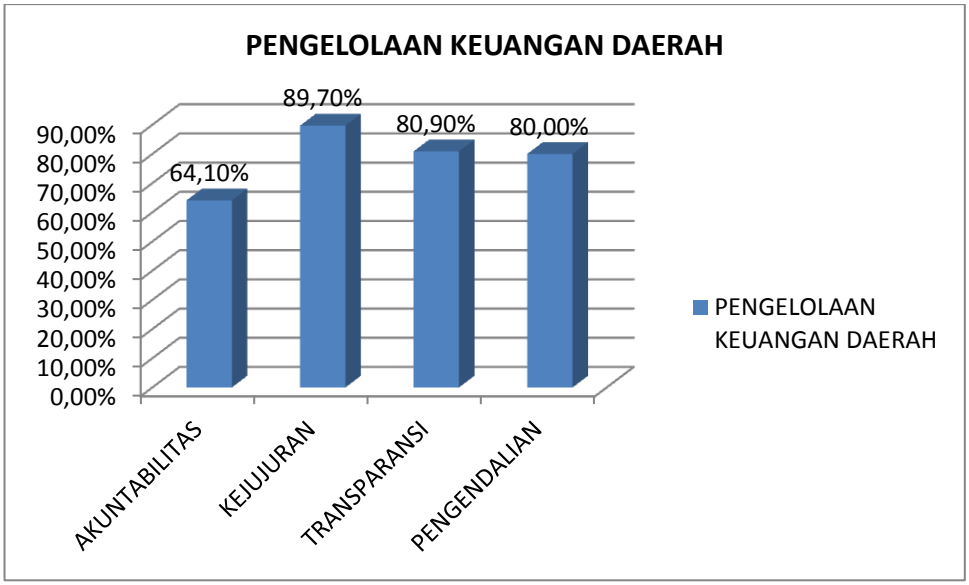
$$\% \text{ skor aktual} = \frac{136}{34 \times 5 \times 1} \times 100\%$$

% skor aktual = 80,0%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator pengendalian berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 80,0%. Nilai yang diperoleh masuk kategori baik (berada pada interval 68%- 84%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa pengendalian dari pengelolaan keuangan daerah pada Dinas di

Pemerintah Daerah Kota Bandung sudah dilaksanakan dengan baik meskipun belum optimal.

Untuk lebih jelasnya tanggapan responden terhadap dimensi akuntabilitas, kejujuran, transparansi, dan pengendalian pada Dinas Pemerintah Daerah Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 4.8.




Gambar 4.8. Histrogram Tanggapan Responden terhadap pengelolaan keuangan daerah

### 4.3.3 Analisis Deskriptif Kinerja Pemerintah daerah

Kinerja Pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*staregic planning*) suatu organisasi. Dalam penelitian yang dilakukan variabel Kinerja Pemerintah pada Dinas di Pemerintah Daerah

Kota Bandung, diukur dengan 3 Indikator yaitu Ekonomi, Efisien dan Efektifitas. Dan dioperasionalisasikan menjadi 6 butir pernyataan.

**Tabel 4.15**

**Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Kinerja Pemerintah Daerah**

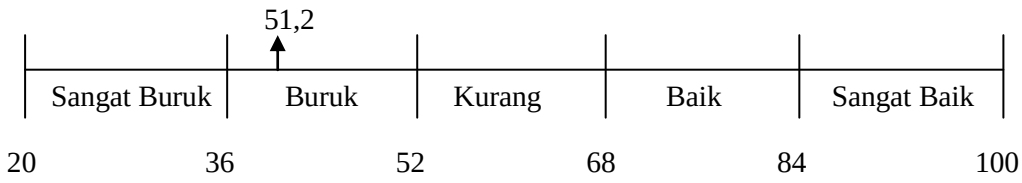
| No | Indikator | Total Skor | Skor Ideal | % | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekonomi | 242 | 510 | 47.5% | Kurang Baik |
| 2 | Efisien | 117 | 170 | 68.8% | Baik |
| 3 | Efektifitas | 163 | 340 | 47.9% | Kurang Baik |
| | Total | 522 | 1020 | 51.2% | Kurang Baik |

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung dinilai masih belum baik. Hal ini berarti bahwa Kinerja Pemerintah daerah meskipun sudah berjalan namun belum optimal terutama dalam sisi ekonomi dan efektifitas kinerjanya.

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.14 di atas tersebut di interpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 4.9**

**Skala Penafsiran Persentase Skor Variabel Kinerja Pemerintah Daerah**




Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel kinerja Pemerintah daerah sebesar 51,2 berada di antara interval 36 –

52. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung secara umum berada dalam kategori buruk. Bila dilihat berdasarkan indikator tampak bahwa keekonomian yang dilakukan pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung kurang baik. Kemudian keefisienan pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung sudah baik , dan keefektifan pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung masih kurang baik.

Dan hal ini sama dengan fenomena yang disebutkan pada latar belakang bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung belum sepenuhnya ekonomi, efisien, dan efektif (www.bpk.go.id). Agar dalam menilai kinerja organisasi dapat dilakukan secara objektif, maka diperlukan indikator kinerja yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2002).

Agar lebih jelas maka penulis juga menyajikan gambaran kinerja Pemerintah daerah pada masing-masing butir pernyataan, yang diukur menggunakan 3 (tiga) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 6 butir pernyataan. Berikut gambaran tanggapan responden terhadap setiap butir pertanyaan pada masing-masing indikator.

**1. Ekonomi**

Gambaran mengenai indikator ekonomi di Dinas-Dinas Kota Bandung terangkum pada tabel berikut:

**Tabel 4.16**

**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Ekonomi**

| No. | Butir Pernyataan | | Skor Tanggapan Responden | | | | | Total Skor | Skor Ideal | % Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 22 | Terjadi ketidakhematan kaerena adanya pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan | f | 2 | 3 | 11 | 11 | 7 | 84 | 170 | 49.4% |
| | | % | 5.88 | 8.82 | 32.35 | 32.35 | 20.59 | | | |
| 23 | Terjadi ketidakhematan karena adanya penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa tidak sesuai | f | 1 | 3 | 12 | 10 | 8 | 81 | 170 | 47.6% |
| | | % | 2.94 | 8.82 | 35.29 | 29.41 | 23.53 | | | |
| 24 | Terjadi ketidakhematan karena adanya pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga | f | 1 | 4 | 9 | 9 | 11 | 77 | 170 | 45.3% |
| | | % | 2.94 | 11.76 | 26.47 | 26.47 | 32.35 | | | |
| Total Skor | | | | | | | | 242 | 510 | |
| % Skor Aktual | | | | | | | | 47.5% | | |

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Ekonomi mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{42}{34 \times 5 \times 3} \times 100\%$$

% skor aktual = 47,5%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Ekonomi berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 47,5%. Nilai yang diperoleh masuk kategori

kurang (berada pada interval 52%- 68%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa Kinerja Pemerintah daerah yang dilakukan pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung dilihat dari sisi ekonomi dinilai masih kurang (tidak optimal) sehingga tidak tercapainya pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*staregic planning*) suatu organisasi.

**2. Efisiensi**

Gambaran mengenai indikator efisiensi di Dinas-Dinas Kota Bandung terangkum pada tabel berikut.

**Tabel 4.17**

**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Efisiensi**

| No. | Butir Pernyataan | | Skor Tanggapan Responden | | | | | Total Skor | Skor Ideal | % Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 25 | Kegiatan operasional efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumberdaya dan dana yang serendah-rendahnya | f | 7 | 10 | 11 | 3 | 3 | 117 | 170 | 68.8% |
| | | % | 20.59 | 29.41 | 32.35 | 8.82 | 8.82 | | | |

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Efisien mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{117}{34 \times 5 \times 1} \times 100\% \qquad \% \text{ skor aktual} = 68{,}8\%$$

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Efisien berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 68,8%. Nilai yang diperoleh masuk kategori cukup baik (berada pada interval 68%- 84%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa Kinerja Pemerintah daerah yang dilakukan pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung dinilai sudah efisien meskipun belum optimal sehingga pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*staregic planning*) suatu organisasi masih perlu diperhatikan agar lebih baik lagi.

**3. Efektif**

**Tabel 4.18**

**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Efektifitas**

| No. | Butir Pernyataan | | Skor Tanggapan Responden | | | | | Total Skor | Skor Ideal | % Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 26 | Terjadi ketidakefektifan karena adanya penggunaan tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan | f | 3 | 2 | 12 | 10 | 7 | 86 | 170 | 50.6% |
| | | % | 8.82 | 5.88 | 35.29 | 29.41 | 20.59 | | | |
| 27 | Terjadi ketidakefektifan karena adanya barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi | f | 0 | 6 | 7 | 11 | 10 | 77 | 170 | 45.3% |
| | | % | 0.00 | 17.65 | 20.59 | 32.35 | 29.41 | | | |
| Total Skor | | | | | | | | 163 | 340 | |
| % Skor Aktual | | | | | | | | 47.9% | | |

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal untuk Indikator Efektifitas mengunakan rumus sebagai berikut:

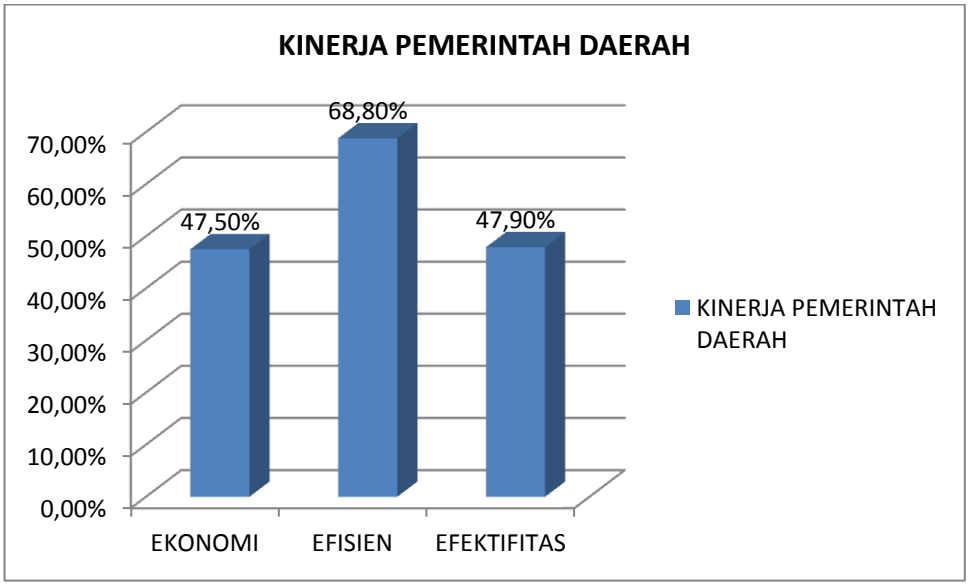
$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{163}{34 \times 5 \times 2} \times 100\%$$

% skor aktual = 47,9%

Hasil persentase skor aktual dari Indikator Efektifitas berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 47,9%. Nilai yang diperoleh masuk kategori baik (berada pada interval 36%- 52%). Hasil yang diperoleh mengandung pengertian bahwa Kinerja Pemerintah daerah yang dilakukan pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung dilihat dari sisi Efektifitas dinilai masih kurang (tidak optimal) sehingga tidak tercapainya pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*staregic planning*) suatu organisasi.

Untuk lebih jelasnya tanggapan responden terhadap dimensi ekonomi, efisien, dan efektifitas pada Dinas Pemerintah Daerah Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 4.10.




Gambar 4.10. Histrogram Tanggapan Responden terhadap kinerja pemerintah daerah

## 4.4 Analisis Verifikatif

### 4.4.1 Pengaruh Pengawasan intern dan Pengelolaan keuangan daerah terhadap Kinerja Pemerintah daerah

Setelah diuraikan gambaran objek penelitian yang diteliti berdasarkan data tanggapan responden, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk menjawab permasalahan yang diteliti berkaitan dengan diuji pengaruh Pengawasan intern dan Pengelolaan keuangan daerah terhadap Kinerja Pemerintah daerah baik secara simultan maupun secara parsial menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; Pengujian uji asumsi klasik, hasil analisis regresi linier, koefisien korelasi parsial, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Analisis regresi berganda dilakukan dengan bantuan software SPSS.18.

Data yang dikumpulkan dari kuisioner yang mempunyai skala pengukuran ordinal. Untuk memenuhi syarat data yang digunakan sekurang-kurangnya mempunyai tingkat pengukuran interval, data hasil kuesioner terlebih dahulu ditransformasikan menjadi skala interval menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI). Hasil perhitungan skor data variabel X dan Y setelah ditransformasikan menjadi skala interval menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI) dapat dilihat pada lampiran.

#### 4.4.1.1 Hasil Pengujian Asumsi Regresi

Sebelum melakukan analisis data maka model regresi diuji kesesuaian asumsi klasik y.ang bertujuan untuk mendapatkan model regresi yang baik. model regresi yang baik yang harus data yang dihasilkan harus berdistribusi normal, terbebas dari Multikolinieritas, Heteroskedastisitasi. Hasil yang diperoleh dalam menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut :

**1. Uji Normalitas Residu**

Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji normalitas data residual hasil taksiran model regresi (error term). Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov terhadap data residual hasil taksiran model regresi. Hasil perhitungan untuk model yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.19**

**Hasil Uji Normalitas**

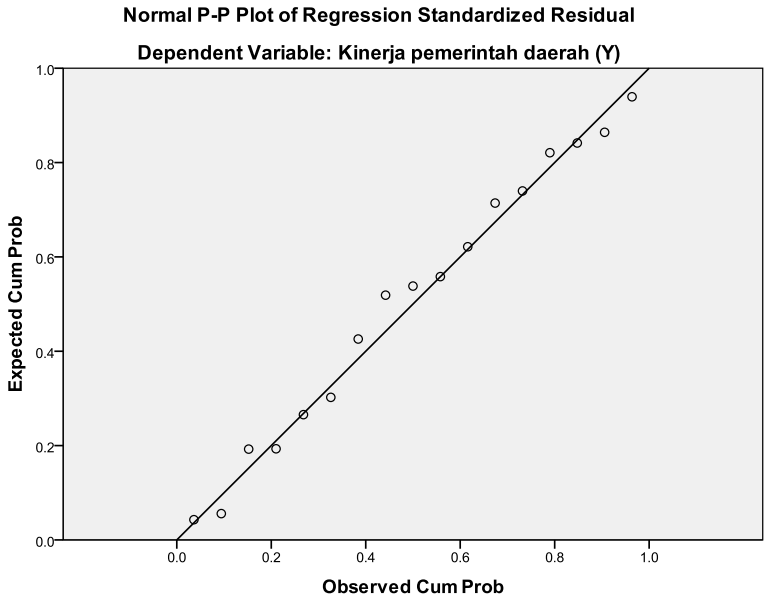
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

| | | Unstandardized Residual |
|---|---|---|
| N | | 17 |
| Normal Parameters[a,b] | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .26503280 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .108 |
| | Positive | .073 |
| | Negative | -.108 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .447 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .988 |

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai $D_{hitung}$ = 0,108 dengan p-value (nilai sig) sebesar 0,988. Hasil pengujian normalitas model regresi menunjukkan bahwa nilai residual dari model berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan normalitas menunjukan nilai probabilitas (sig.) *Kolmogorov-Smirnov Test* yang diperoleh untuk nilai residual sebesar 0,988 lebih besar dari 0,05.

Uji normalitas dapat juga dilakukan dengan menggunakan PP plot standardized residual. PP-*plot standardized residual* menunjukkan pola data terdistribusi normal. Tampilan grafik normal dapat disimpulkan bahwa grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.




Gambar 4.11

Grafik PPPlot dari Hasil Pengujian Normalitas

**2. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat interkorelasi yang sempurna di antara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Apabila terjadi gejala multikolinearitas, maka bisa mengakibatkan nilai koefisien regresi menjadi kurang dapat dipercaya dan kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan melihat korelasi antar variabel bebas yang akan digunakan dalam persamaan regresi Apabila sebagian atau seluruh variabel bebas berkorelasi kuat berarti terjadi multikolinearitas.

Metode yang digunakan untuk menguji adanya multikolinieritas ini dapat dilihat pada *tolerance value* atau *Variance Inflation Factors (VIF)*. Batas *tolerance value* adalah 0,10 dan *Variance Inflation Factors (VIF)* adalah 10. Jika nilai *tolerance value* di bawah 0,10 atau nilai *Variance Inflation Factors (VIF)* di atas 10 maka

terjadi multikolinieritas. Besarnya nilai VIF ddan *tolerance value* ari masing-masing variabel independen yang ditunjukkan dalam output SPSS dapat dilihat pada tabel 4.17 sebagai berikut.

**Tabel 4.20**

**Hasil Perhitungan VIF**

**Coefficients[a]**

| Model | | Collinearity Statistics | |
|---|---|---|---|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | Pengawasan intern (X1) | .910 | 1.099 |
| | Pengelolaan keuangan daerah (X2) | .910 | 1.099 |

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah daerah (Y)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance value* semua variabel berada di atas 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factors (VIF)* di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam persamaan regresi berganda.

### 3. Uji Asumsi Bebas Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas berarti varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir (estimator) yang diperoleh menjadi tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun sampel besar meskipun penaksir yang diperoleh menggambarkan populasinya dan bertambahnya sampel yang digunakan akan mendekati nilai sebenarnya (konsisten). Hal ini disebabkan variansnya yang tidak minimum atau dengan kata lain tidak efisien.

Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji korelasi rank Spearman. Hasil pengujian dengan menggunakan pendekatan korelasi spearman antara nilai residual dengan variabel bebas (X1 dan X2) diberikan pada tabel berikut

**Tabel 4.21**

**Hasil Korelasi Rank Spearman untuk Uji Heteroskedastisitas**

**Correlations[a]**

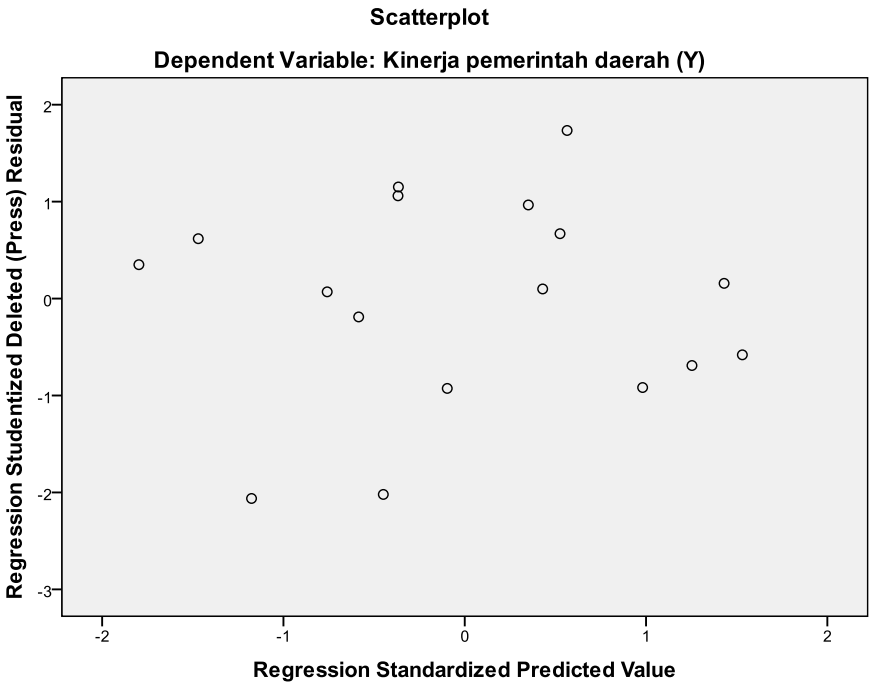
| | | | absr | Pengawasan intern (X1) | Pengelolaan keuangan daerah (X2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spearman's rho | absr | Correlation Coefficient | 1.000 | -.154 | -.066 |
| | | Sig. (2-tailed) | . | .554 | .801 |
| | Pengawasan intern (X1) | Correlation Coefficient | -.154 | 1.000 | .319 |
| | | Sig. (2-tailed) | .554 | . | .213 |
| | Pengelolaan keuangan daerah (X2) | Correlation Coefficient | -.066 | .319 | 1.000 |
| | | Sig. (2-tailed) | .801 | .213 | . |

a. Listwise N = 17

Sumber : Lampiran Output SPSS

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari residual homogen (tidak terdapat heteroskedastisitas). Hal ini ditunjukan oleh hasil korelasi variabel $X_1$ dan $X_2$ dengan nilai absolut dari residual (error) tidak signifikan pada level 5%. Diperoleh nilai signifikansi untuk $X_1$ sebesar 0,554 dan untuk $X_2$ sebesar 0,801 (nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sebagai batas tingkat kekeliruan).

Untuk mengetahui hasil Heteroskedastisitas dapat juga dilakukan dengan melihat grafik Scetter plot nilai residual. Hasil plot yang diperoleh dari SPSS dapat dilihat pada grafik di bawah ini:




Gambar 4.12

Grafik Scatter Plot dari Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Dari gambar di atas, dapat dilihat sebaran nilai residual terlihat pada plot yang terpencar dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan hasil demikian, kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa tidak terjadi gejala homokedastisitas atau persamaan regresi memenuhi asumsi heterokedastisitas.

### 4.4.1.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pengaruh Pengawasan intern dan Pengelolaan keuangan daerah terhadap Kinerja Pemerintah daerah. Pada model regresi yang digunakan, variabel Pengawasan intern dan Pengelolaan keuangan daerah merupakan variabel bebas (X) dan variabel tidak bebas (Y) adalah Kinerja Pemerintah daerah. Hasil perhitungan perhitungan koefisien

regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 18 for windows berdasarkan data penelitian adalah berikut :

**Tabel 4.22**

**Hasil Perhitungan Koefisien Regresi X terhadap Y**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -.706 | .567 | | -1.245 | .233 |
| | Pengawasan intern (X1) | .698 | .189 | .579 | 3.689 | .002 |
| | Pengelolaan keuangan daerah (X2) | .362 | .128 | .444 | 2.826 | .013 |

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah daerah (Y)

Sumber : Lampiran Output SPSS

Diperoleh persamaan regresi taksiran untuk melihat pengaruh Pengawasan intern dan Pengelolaan keuangan daerah terhadap Kinerja Pemerintah daerah adalah sebagai berikut

$\hat{Y} = -0{,}706 + 0{,}698\ X_1 + 0{,}362\ X_2$

Nilai konstanta bernilai yaitu –0,706. Artinya bila seluruh variabel bebas dianggap konstan, maka tara-rata peningkatan Kinerja Pemerintah daerah sebesar –0,706. Koefisien regresi variabel Pengawasan intern ($X_1$) bernilai bertanda positif sebesar 0,698 menyatakan bahwa bila variabel Pengelolaan keuangan daerah dianggap kostan maka peningkatan skor penilaian Pengawasan intern terhadap sebesar satu satuan akan menyebabkan peningkatan Kinerja Pemerintah daerah sebesar 0,698. Jadi semakin baik Pengawasan intern maka Kinerja Pemerintah daerah semakin tinggi.

Koefisien regresi untuk Pengelolaan keuangan daerah ($X_2$) bertanda positif sebesar 0,362 menyatakan bahwa bila variabel Pengelolaan keuangan daerah dianggap kostan maka peningkatan skor penilaian terhadap Pengawasan intern

sebesar satu satuan akan menyebabkan peningkatan Kinerja Pemerintah daerah sebesar 0,362. Jadi semakin tinggi Pengelolaan keuangan daerah maka Kinerja Pemerintah daerah semakin tinggi.

**4.4.1.3 Hasil Pengujian Hipotesis secara Bersama (Simultan) melalui Uji F**

Uji F digunakan untuk pengujian koefisien regresi secara keseluruhan untuk mengetahui keberartian hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut :

$Ho_1$ : Pengawasan intern dan Pengelolaan keuangan daerah tidak $\beta_1 = \beta_2 = 0$ berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah daerah

$Ha_1$ : Pengawasan intern dan Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh Ada $\beta_i \neq 0$ terhadap Kinerja Pemerintah daerah

Untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya dilakukan dengan membandingkan antara $F_{hitung}$ dengan nilai $F_{tabel}$. Dari tabel F diperoleh nilai $F_{tabel}$ dengan $db_1 = 2$ dan $db_2 = 17\text{-}2\text{-}1 = 14$ sebesar 3,739. Nilai statistik uji F diperoleh dalam tabel Anova hasil SPSS pada tabel berikut:

**Tabel 4.23**

**Hasil Uji Simultan**

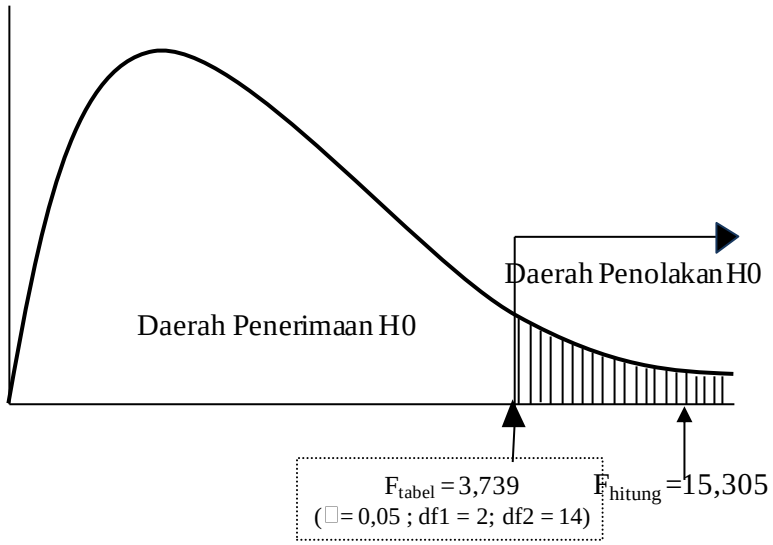
**ANOVA[b]**

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 2.457 | 2 | 1.229 | 15.305 | .000[a] |
| | Residual | 1.124 | 14 | .080 | | |
| | Total | 3.581 | 16 | | | |

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan keuangan daerah (X2), Pengawasan intern (X1)
b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah daerah (Y)

Sumber : Lampiran Output SPSS

Diperoleh nilai F hitung sebesar 15,305 dengan signifikansi 0,000. Keputusan penolakan/penerimaan hipotesis pada pengujian simultan dapat digambarkan dalam diagram daerah penerimaan dan penolakan Ho sebagai berikut:




Gambar 4.13

Daerah Penerimaan Dan Penolakan Ho Pada Pengujian Simultan

Diperoleh $F_{hitung}$ lebih besar dari $F_{tabel}$ (15,305 > 3,739). Dengan demikian, hasil uji menunjukkan menolak Ho. Jadi hasil pengujian statistik secara simultan adalah tidak signifikan. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya (0,000) yang lebih kecil dari nilai α = 0,05), yang berarti kesalahan untuk menyatakan ada pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas signifikan sangat kecil atau lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5% (α = 0,05).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pengawasan intern dan Pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah daerah.

### 4.4.1.4 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui korelasi ganda dan besarnya pengaruh secara bersama-sama Pengawasan intern dan Pengelolaan keuangan daerah terhadap Kinerja Pemerintah daerah dapat dilihat nilai korelasi dan koefisien determinasi ($R^2$). Tabel berikut merupakan hasil perhitungan koefisien determinasi untuk persamaan regresi yang diperoleh dengan *SPSS 18 for windows* sebagai berikut :

**Tabel 4.24**

**Tabel Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi**

**Model Summary[b]**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .828[a] | .686 | .641 | .28333 |

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan keuangan daerah (X2), Pengawasan intern (X1)
b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah daerah (Y)

Sumber : Lampiran Output SPSS

Diperoleh besarnya korelasi ganda antara Pengawasan intern dan Pengelolaan keuangan daerah dengan Kinerja Pemerintah daerah sebesar 0,828. Nilai korelasi yang diperoleh masuk dalam kategori sangat kuat. Artinya antara perubahan dalam Pengawasan intern dan Pengelolaan keuangan daerah akan sangat berkaitan dengan Kinerja Pemerintah daerah.

Dari hasil analisis data dapat diketahui, pada tabel model *summary* besarnya R-*square* ($R^2$) atau koefisien determinasi adalah 0,686. Hal ini berarti 68,6% perubahan Kinerja Pemerintah daerah dipengaruhi (dapat dijelaskan) oleh Pengawasan intern dan Pengelolaan keuangan daerah sedangkan 31,4% lainnya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu seperti responsivitas dan responsibilitas.

### 4.4.1.5 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial melalui Uji t

Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh signifikan secara parsial dilakukan pengujian koefisien regresi dengan menggunakan statistik Uji t. Penentuan hasil pengujian (penerimaan/ penolakan $H_0$) dapat dilakukan dengan membandingkan $t_{hitung}$ dengan $t_{tabel}$ atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Nilai $t_{tabel}$ dengan taraf kesalahan 5% dan db = n–k–1 = 17-2-1 = 14 adalah 2,145.

**Tabel 4.25**

**Hasil Uji Parsial Regresi X terhadap Y**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -.706 | .567 | | -1.245 | .233 |
| | Pengawasan intern (X1) | .698 | .189 | .579 | 3.689 | .002 |
| | Pengelolaan keuangan daerah (X2) | .362 | .128 | .444 | 2.826 | .013 |

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah daerah (Y)

Sumber : Lampiran Output SPSS

**a. Pengaruh Pengawasan intern Terhadap Kinerja Pemerintah daerah**

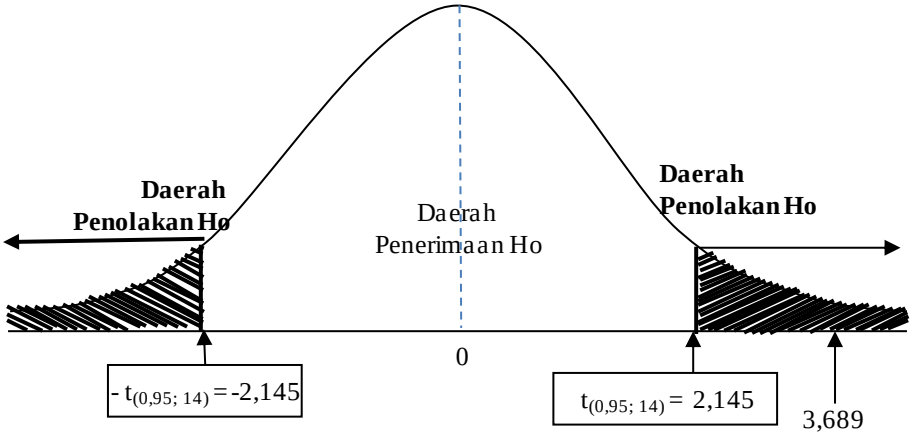
Untuk melihat pengaruh Pengawasan intern terhadap Kinerja Pemerintah daerah, hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_{02}$ :$\beta_1 = 0$ Pengawasan intern tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah daerah

$Ha_2$ : $\beta_1 \neq 0$ Pengawasan intern berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah daerah

Hasil perhitungan nilai t-hitung untuk variabel Pengawasan intern ($X_1$) diperoleh sebesar 3,689dengan nilai signifikansi (p-value) = 0,002.

Keputusan penolakan/penerimaan hipotesis (hasil perbandingan $t_{hitung}$ dengan $t_{tabel}$) pada pengujian parsial dapat digambarkan dalam diagram daerah penerimaan dan penolakan $H_0$ sebagai berikut :




Gambar 4.14

Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji Parsial $X_1$ terhadap Y

Diperoleh nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($t_{hitung}$ = 3,689> $t_{tabel}$ = 2,145). Keputusan uji adalah menolak H0. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya (0,002) yang lebih kecil dari nilai α = 0,05. Artinya kesalahan untuk menyatakan ada pengaruh Pengawasan intern terhadap Kinerja Pemerintah daerah signifikan hanya 0,2% atau lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5% (α = 0,05) sehingga keputusan uji adalah menolak H0. Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa Pengawasan intern berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Pemerintah daerah.

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari Pengawasan intern terhadap Kinerja Pemerintah daerah dihitung korelasi parsial.Hasil perhitungan dengan perhitungan *SPSS 18 for windows* sebagai berikut:

**Tabel 4.26**
**Korelasi Parsial Pengawasan intern dengan Kinerja Pemerintah daerah pada saat Pengelolaan keuangan daerah Tidak mengalami perubahan**

**Correlations**

| Control Variables | | | Pengawasan intern (X1) | Kinerja Pemerintah daerah (Y) |
|---|---|---|---|---|
| Pengelolaan keuangan daerah (X2) | Pengawasan intern (X1) | Correlation | 1.000 | .702 |
| | | Significance (2-tailed) | . | .002 |
| | | df | 0 | 14 |
| | Kinerja Pemerintah daerah (Y) | Correlation | .702 | 1.000 |
| | | Significance (2-tailed) | .002 | . |
| | | df | 14 | 0 |

Nilai korelasi yang diperoleh antara Pengawasan intern dengan Kinerja Pemerintah daerah pada saat Pengelolaan keuangan daerah tidak mengalami perubahan sebesar 0,702 masuk dalam kategori kuat. Artinya antara Pengawasan intern dengan Kinerja Pemerintah daerah pada saat Pengelolaan keuangan daerah tidak mengalami perubahan terjadi hubungan positif yang kuat, jika Pengawasan intern semakin tinggi akan diikuti dengan Kinerja Pemerintah daerah yang menjadi semakin meningkat.

Koefisiensi Determinasi (KD) parsial $X_1$ terhadap Y diperoleh menggunakan rumus berikut :

$Kd = r^2 \times 100\ \%$

$Kd = (0{,}702)^2 \times 100\ \%$

$Kd = 0{,}493 \times 100\%$

$Kd = 49{,}3\%$

Besar pengaruh Pengawasan intern terhadap Kinerja Pemerintah daerah pada saat Pengelolaan keuangan daerah tidak berubah adalah 49,3%.

**b. Pengaruh Pengelolaan keuangan daerah Terhadap Kinerja Pemerintah daerah**

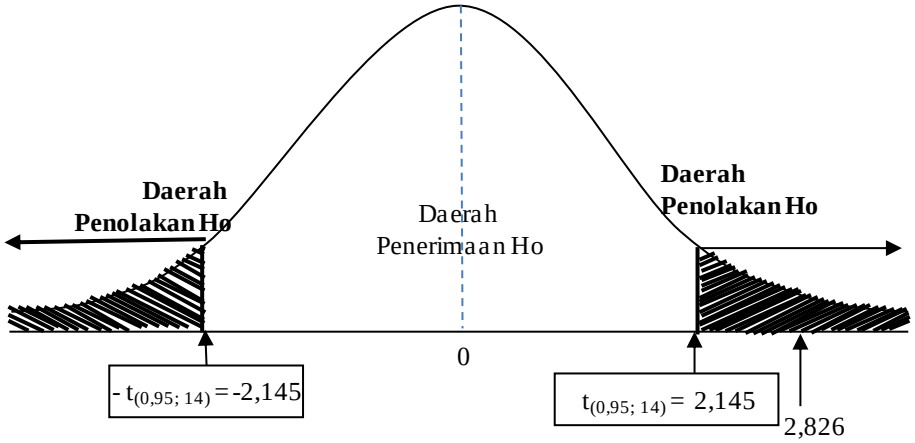
Untuk melihat pengaruh Pengelolaan keuangan daerah terhadap Kinerja Pemerintah daerah, hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_{03}$ :$\beta_2 = 0$ Tidak terdapat pengaruh dari Pengelolaan keuangan daerah terhdap Kinerja Pemerintah daerah

$Ha_3$ : $\beta_2 \neq 0$ Terdapat pengaruh dari Pengelolaan keuangan daerah terhdap Kinerja Pemerintah daerah

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t-hitung untuk variabel Pengelolaan keuangan daerah ($X_2$) sebesar 2,826 dengan nilai signifikansi (p-value) = 0,013.

Keputusan penolakan/penerimaan hipotesis (hasil perbandingan $t_{hitung}$ dengan $t_{tabel}$) pada pengujian parsial dapat digambarkan dalam diagram daerah penerimaan dan penolakan $H_0$ sebagai berikut :




Gambar 4.15
Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji Parsial $X_2$ terhadap Y

Diperoleh nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($t_{hitung}$ = 2,826 > $t_{tabel}$ = 2,145). Keputusan uji adalah menolak H0. Kesimpulan di atas didukung pula dari

nilai signifikansinya (0,013) yang lebih kecil dari nilai α = 0,05. Artinya kesalahan untuk menyatakan ada pengaruh Pengelolaan keuangan daerah terhadap Kinerja Pemerintah daerah signifikan hanya 1,3% atau lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5% (α = 0,05) sehingga keputusan uji adalah menolak H0. Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Pemerintah daerah.

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari Pengelolaan keuangan daerah terhadap Kinerja Pemerintah daerah dihitung korelasi parsial.Hasil perhitungan dengan perhitungan *SPSS 18 for windows* sebagai berikut:

**Tabel 4.27**
**Korelasi Parsial Pengelolaan keuangan daerah dengan Kinerja Pemerintah daerah pada saat Pengawasan intern tidak mengalami perubahan**

**Correlations**

| Control Variables | | | Pengelolaan keuangan daerah (X2) | Kinerja Pemerintah daerah (Y) |
|---|---|---|---|---|
| Pengawasan intern (X1) | Pengelolaan keuangan daerah (X2) | Correlation | 1.000 | .603 |
| | | Significance (2-tailed) | . | .013 |
| | | df | 0 | 14 |
| | Kinerja Pemerintah daerah (Y) | Correlation | .603 | 1.000 |
| | | Significance (2-tailed) | .013 | . |
| | | df | 14 | 0 |

Nilai korelasi yang diperoleh antara Pengelolaan keuangan daerah dengan Kinerja Pemerintah daerah pada saat Pengawasan intern tidak mengalami perubahan sebesar 0,603 masuk dalam kategori kuat. Artinya antara Pengelolaan keuangan daerah dengan Kinerja Pemerintah daerah pada saat Pengawasan intern tidak mengalami perubahan terjadi hubungan berbanding lurus yang erat, jika Pengelolaan keuangan daerah semakin tinggi akan diikuti dengan Kinerja Pemerintah daerah yang menjadi meningkat.

Koefisiensi Determinasi (KD) parsial $X_2$ terhadap Y diperoleh menggunakan rumus berikut :

$Kd = r^2 \times 100\ \%$

$Kd = (0{,}603)^2 \times 100\ \%$

$Kd = 0{,}363 \times 100\%$

$Kd = 36{,}3\%$

Besar pengaruh Pengelolaan keuangan daerah terhadap Kinerja Pemerintah daerah pada saat Pengawasan intern tidak berubah sebesar 36,3%.

**c. Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Bersama-sama Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Pengujian secara bersama-sama bertujuan untuk membuktikan apakah pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Ho : Semua $\beta i = 0$<br>$i = 1,2$ | Pengawasan intern dan Pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung |
| Ha : Ada $\beta i \neq 0$<br>$i = 1,2$ | Pengawasan intern dan Pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung |

Dari hasil pengolahan dapat dilihat bahwa koefisien regresi dari kedua variabel bebas lebih besar dari nol. Karena koefisien regresi dari kedua variabel bebas lebih besar dari nol maka disimpulkan bahwa pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung. Secara bersama-sama pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 68,6% terhadap perubahan Kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung. Artinya, 68,6% Kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung, disebabkan atau dapat dijelaskan oleh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah. Sementara 28.1% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar kedua variabel tersebut, seperti: verifikasi independen, pengendalian aplikasi , pengendalian umum, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## 4.5 Pembahasan

### 4.5.1 Pengaruh Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan analisis deskriptif pengawasan intern sebesar 71,2%. sedangkan kinerja Pemerintah daerah berada pada kategori kurang baik dengan persentase sebesar 51,2%. artinya jauh dibawah skor ideal yang diharapkan. Namun masih perlu ditingkatkan menjadi katagori baik ideal. Dalam peningkatan kinerja Pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung perlu mempertimbangkan indikator variabel pengawasan intern dan kinerja Pemerintah daerah yang dinyatakan perlu ditingkatkan yaitu:

1. Dimensi lingkungan pengendalian terutama indikator penegakan intergritas dan nilai etika perlu ditingkatkan untuk mengetahui sistem informasi dan sistem akuntansi diorganisir
2. Dimensi penaksiran risiko perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan organisasi
3. Dimensi kegiatan pengendalian,terutama dalam pencatatan transaksi perlu ditingkatkan lagi, sehingga dapat mendorong kinerja dan kehandalan informasi.
4. Dimensi informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan lagi karena sangat penting bagi keberhasilan atau peningkatan mutu operasional organisasi. Kemudian dapat memberikan data yang berhubungan dengan sasaran, akurat dan terperinci, dan mudah dipahami/digunakan.
5. Dimensi monitoring juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kehandalan informasi dan *internal control* dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($t_{hitung}$ = 3,689> $t_{tabel}$ = 2,145). Keputusan uji adalah menolak H0. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya (0,013) yang lebih kecil dari nilai α = 0,05. Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa Pengawasan intern berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Besar pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada saat pengelolaan keuangan daerah tidak berubah sebesar 49,3%. Menunjukkan bahwa cukup jauh dibawah ideal yang diharapkan. Hal ini dapat menunjukkan

bahwa pengawasan intern belum berjalan dengan optimal pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung. Dan menunjukkan adanya fenomena bahwa adanya kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan dan kelemahan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas-dinas di Pemerintah Kota Bandung. Jadi untuk mencapai kinerja pemerintah daerah yang baik, maka pengawasan intern harus ditingkatkan pada setiap Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Karena pengawasan intern sangat mempengaruhi kinerja Pemerintah daerah yaitu untuk membantu manajemen melaksanakan tanggungjawabnya dalam mencapai kinerja secara efektif. Pengawasan intern dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas Pemerintah. Semakin baik pengawasan intern yang dilaksanakan akan memberi dampak semakin baik kinerja Pemerintah daerah yang disampaikan.

### 4.5.2 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan analisis deskriptif pengelolaan keuangan daerah sebesar 78,5%, sedangkan kinerja Pemerintah daerah sebesar 51,2%. Menunjukkan bahwa cukup jauh dibawah ideal yang diharapkan. Namun masih perlu ditingkatkan menjadi katagori baik ideal. Dalam peningkatan kinerja Pemerintah daerah pada pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung perlu mempertimbangkan indikator variabel pengelolaan keuangan dan kinerja Pemerintah daerah yang dinyatakan perlu ditingkatkan yaitu :

1. Dalam variabel pengelolaan keuangan daerah pada indikator akuntabilitas perlu ditingkatkan lagi, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat bekerja dengan tanggungjawab yang penuh.
2. Dalam proses pengelolaan keuangan perlu ditingkatkan kejujuran, supaya dalam operasional keuangan daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Karena penempatan staf yang jujur dengan didukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang baik akan mendorong terjadinya penghematan sebagai dampak kecilnya korupsi.
3. Transparansi perlu ditingkatkan lagi, sehingga dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran tertentu.
4. Pengendalian perlu ditingkatkan lagi, supaya proses keterbukaan dalam melakukan kontrol dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($t_{hitung} = 2{,}826 > t_{tabel} = 2{,}145$). Keputusan uji adalah menolak H0. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya (0,013) yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 0{,}05$. Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Besar pengaruh Pengelolaan keuangan daerah terhadap Kinerja Pemerintah daerah pada saat Pengawasan intern tidak berubah sebesar 36,3%. Menunjukkan bahwa cukup jauh dibawah ideal yang diharapkan. Hal ini dapat menunjukkan

bahwa pengelolaan keuangan belum berjalan dengan optimal pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung. Dan menunjukkan fenomena bahwa adanya ketidakpatuhan terhadap perundangundangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan dan administrasi pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung. Jadi untuk mencapai kinerja pemerintah daerah yang baik, maka pengelolaan keuangan daerah harus ditingkatkan pada setiap Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, implementasi pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja merupakan merupakan syarat implementasi konsep *value for*. Pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja merupakan adanya akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggaran pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan pengelolaan keuangan mencapai tujuan dan sasaran periodic yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa apabila pengelolaan keuangan daerah sudah baik, maka kinerja pemerintah daerah akan lebih baik, dengan baiknya pengelolaan keuangan daerah, maka tingkat kinerja pemerintah daerah akan meningkat.

### 4.5.3 Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Besar pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah sebesar 68,6%. Menunjukkan bahwa cukup

jauh dibawah ideal yang diharapkan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah belum berjalan dengan optimal pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung. Dan menunjukkan fenomena bahwa kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung belum efisien dan efektif dikarenakan oleh ketidakpatuhan terhadap perundangundangan. Jadi, untuk mencapai kinerja pemerintah daerah yang optimal, maka perlu ditingkatkan pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah pada setiap Dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandung.